



APBD

APBD 2026 TERJUN BEBAS

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 2



Fiskal Berau Kritis, APBD 2026 Turun Drastis

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026 telah disahkan oleh DPRD dengan total anggaran disepakati sebesar Rp3.425.843.000.000. Pengesahan ini dilakukan di tengah tantangan fiskal yang berat, terutama akibat adanya koreksi signifikan pada target pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Bupati Berau, Sri Juniar-sih, dalam Sidang Paripurna pada Minggu (30/11/2025), mengungkapkan bahwa penyusunan APBD 2026 sangat menantang karena terjadi penurunan target pendapatan yang cukup besar.

Proyeksi APBD Berau mengalami kontraksi signifikan, dari semula Rp4,2 triliun menjadi hanya Rp2.720.624.224.796. Pendapatan daerah itu terdiri dari PAD Rp450 miliar dan Pendapatan Transfer Rp2,27 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan terkait dana Transfer ke Daerah yang tertuang dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025.

Dengan total belanja daerah yang mencapai Rp3.425.843.000.000, Pemerintah Kabupaten Berau mengambil kebijakan defisit anggaran untuk menyeimbangkan postur APBD yang ketat.

Defisit tersebut direncanakan akan ditutup menggunakan Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp688.373.284.204, yang berasal dari kelebihan realisasi pendapatan maupun efisiensi belanja tahun sebelumnya.



Meski di tengah keterbatasan fiskal, Bupati Sri Juniar-sih memastikan Belanja Daerah tetap diprioritaskan untuk mendanai urusan-urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang pemerintahan.

Alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebesar 20 persen dari pagu APBD tahun depan juga dipastikan tidak akan dikurangi.

JANJI POLITIK TETAP DITUNAIKAN

Menanggapi tantangan fiskal tersebut, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan, penurunan anggaran tidak akan menggugurkan penunaian janji politik Pemerintah Kabupaten Berau yang diusung saat Pilkada 2024 oleh Pasangan SraGam.

"Itu sudah janji politik, harus ditunaikan kepada masyarakat Bumi Batiwakkal," tegas Gamalis.

Gamalis menyebutkan bahwa 18 plus program prioritas telah resmi diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan akan menjadi acuan utama pembangunan lima tahun ke depan.

Meskipun anggaran akan memengaruhi daya gedor pembangunan, Gamalis menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembagian program pembangunan yang berskala prioritas secara proporsional, bukan menghapus program.

"Jadi tidak dihilangkan, tapi diatur secara proporsional. Misalnya, bila kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan seharusnya diberikan sepanjang 10 kilometer, pemerintah memulainya dengan memberikan alokasi sebanyak 5 kilometer terlebih dahulu," jelasnya.

Ketua DPW PPP Kaltim ini menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya membangun komunikasi dan melakukan lobi anggaran dengan pemerintah tingkat provinsi dan pusat, meskipun Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri diperkirakan mengalami defisit APBD senilai Rp7 triliun pada 2026.

POTENSI RETRIBUSI PARKIR

Peluang memaksimalkan retribusi parkir menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan PAD. Data menunjukkan Berau memiliki potensi besar dari kendaraan bermotor, dengan total 171,78 ribu unit sepeda motor, 14,16 ribu unit mobil penumpang, dan 11,98 ribu

unit mobil bermuatan.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, besaran retribusi parkir tahunan untuk roda dua (R2) Rp48 ribu, roda empat (R4) Rp72 ribu, dan roda enam (R6)/Truk Rp96 ribu.

Jika diakumulasikan, potensi total pendapatan dari sektor retribusi parkir ini dapat mencapai Rp10,4 miliar dalam setahun, dengan sumbangan terbesar dari kendaraan roda dua (Rp8,2 miliar lebih).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Berau, Mahmuddin, menjelaskan, saat ini pembayaran retribusi parkir masih dilakukan secara manual di loket Dinas Perhubungan.

Selain pembayaran langsung, langkah penarikan efektif yang diterapkan pemerintah antara lain:

1. Operasi Gabungan/Razia: Bekerja sama dengan Polantas Polres Berau, Bapenda, dan Samsat untuk memastikan setiap surat kendaraan dilengkapi bukti pembayaran retribusi pajak parkir.

2. Operasi Penertiban di Tepi Jalan Umum: Pemeriksaan surat dan bukti retribusi parkir dilakukan di titik-titik jalan umum yang ramai. (RUSDIYONO/SULAIMAN)

Revisi Kilat Perda Pajak dan Retribusi Daerah

DPRD Berau secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna, Minggu (30/11/2025) malam, sebagai langkah cepat menindaklanjuti teguran keras dari pemerintah pusat.

Revisi mendesak ini dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Berau menerima surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri pada 18 November 2025. Surat bernomor 900.1.13.1/7971/Keuda itu berisi evaluasi bahwa Perda 7/2023 dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Ancaman sanksi yang disertakan Kemendagri bersifat tegas dan mendesak. Jika revisi tidak dilaksanakan, Pemkab Berau dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) pajak penghasilan sebesar 10-15 persen, serta tidak diberikannya hak pembayaran keuangan kepada kepala daerah selama enam bulan.

Ancaman sanksi tersebut mendorong Pemkab dan DPRD Berau untuk mengakselerasi proses perubahan Perda. Hasil revisi kilat ini wajib dilaporkan kepada Kemendagri dan Kementerian Keuangan paling lambat tujuh hari setelah Perda ditetapkan.



Kepala Bidang P20 Bapenda Berau, Harlina, menegaskan bahwa revisi ini bukanlah inisiatif daerah untuk menaikkan tarif.

"Tidak ada yang menaikkan pajak, hanya harmonisasi aturannya saja," ujarnya, menekankan pembahasan hanya berfokus pada penyesuaian substansi agar sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menjelaskan, inisiatif perubahan regulasi ini merupakan respons langsung terhadap amanat regulasi nasional, khususnya UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

"Kami ingin memastikan kebijakan pajak dan retribusi daerah sejalan dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip keadilan bagi masyarakat," ujar Sri Juniarsih.

Dalam poin-poin krusial yang diubah, Pemkab Berau memberikan perhatian khusus pada sektor ekonomi kerakyatan.

Sri Juniarsih menegaskan adanya komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi penataan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman agar tidak membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, perubahan Perda

juga meliputi penyesuaian teknis pada beberapa jenis pajak daerah, mencakup penyesuaian objek dan pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pengaturan ulang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari sisi retribusi, dilakukan reposisi layanan seperti kesehatan administratif dan sewa fasilitas ke retribusi aset daerah, serta diatur penggunaan standar harga satuan tertinggi dari aplikasi Kementerian PUPR untuk mendukung transparansi.

Sri Juniarsih berharap, persetujuan ini akan membawa hasil nyata berupa peningkatan pelayanan publik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih baik, serta pembangunan berkeadilan di Berau melalui sinergi digitalisasi.

Saat ini, berkas revisi Perda tengah berada di Bagian Hukum Setda Berau untuk finalisasi sebelum ditandatangani oleh Bupati Sri Juniarsih dan didistribusikan secara resmi.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau menyatakan dukungan dan persetujuan penuh terhadap penetapan dua Raperda strategis terkait, yakni APBD Berau 2026 serta Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023

tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Juru Bicara Fraksi PPP, Saga, menegaskan, persetujuan ini didasarkan pada tujuan strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

"Kami menilai perubahan raperda ini sebagai langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah," ujar Saga.

Meskipun memberikan dukungan penuh, Fraksi PPP juga menyampaikan sejumlah masukan penting kepada pemerintah daerah.

PPP mendorong pemerintah untuk terus berbenah dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan, memastikan langkah-langkah strategis lebih tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, PPP juga meminta pemerintah segera melakukan sosialisasi dan komunikasi intensif kepada seluruh jajaran perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat umum.

"Jangan sampai pelaksanaan perda ini membuat semua pihak kaget karena aturan yang berubah," jelasnya. **(SULAIMAN/HENDRA IRAWAN)**



DPRD Berau Kompak Beri Catatan Kritis

RAPAT Paripurna DPRD Berau pada Minggu (30/11/2025) malam menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dan Raperda Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Meskipun disetujui, sejumlah fraksi di DPRD Berau memberikan catatan kritis dan strategis menanggapi kondisi fiskal daerah yang "terjun bebas" setelah adanya pemotongan dana transfer dari pusat.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Perjuangan, Rudi Mangunsong, bahkan menyebut pembahasan APBD 2026 menjadi yang paling sarat dinamika dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa kali diskors hingga menemui jalan buntu.

DPRD Berau menyoroti dampak serius dari penurunan transfer ke daerah, terutama Dana Bagi

Hasil (DBH), yang menyebabkan APBD 2026 hanya disepakati sekitar Rp3,425 triliun.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Sutami, menilai kondisi ini secara langsung mempersempit kapasitas fiskal dan memengaruhi kemampuan Pemkab dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan.

Sutami mengajak seluruh unsur pemerintah untuk menjadikan tekanan ini sebagai momentum untuk memperketat efisiensi anggaran, memperkuat strategi prioritas, dan menegakkan disiplin fiskal.

Rudi Mangunsong juga mengakui penurunan anggaran akan membuat Pemkab "kelim-

ngkin menunda beberapa program visi misi.

Namun, ia melihat ini sebagai tantangan sekaligus momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kualitas belanja dan efisiensi program.

Fraksi Kebangkitan Hanura, melalui juru bicaranya Arman Nofriansyah, menekankan, di tengah keterbatasan anggaran, setiap rupiah yang digunakan harus tepat sasaran dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ada lima catatan utama dari Fraksi Kebangkitan Hanura, yakni anggaran harus tepat sasaran, program prioritas kampung harus direalisasikan, infrastruktur kampung harus menjadi fokus utama, serapan APBD harus optimal, dan pendapatan daerah harus ditingkatkan.

Meskipun transfer pusat menurun, Fraksi Demokrat Perjuangan berharap p e -

layanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah dapat berjalan optimal.

Menyikapi persetujuan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, semua fraksi kompak mengingatkan Pemkab agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil, UMKM, dan pelaku usaha lokal.

"Kebijakan fiskal harus tetap berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Ekonomi tidak boleh tersendat hanya karena regulasi yang memberatkan," kata Sutami.

Fraksi Gerindra bahkan menawarkan lima strategi peningkatan PAD yang dinilai lebih efektif daripada sekadar menaikkan tarif, yaitu: optimalisasi basis pajak yang sudah ada, peningkatan kualitas pelayanan pemungutan, penyederhanaan prosedur, penguatan pengawasan, dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Persetujuan Raperda ini diberikan dengan harapan pengelolaan pajak dan retribusi ke depannya dapat dikelola secara optimal, transparan, akuntabel, serta berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

(HENDRAIRAWAN)



RUDI MANGUNSONG



ARMAN NOFRIANSYAH



SUTAMI



Pelaku Penyimpangan Seksual Anak Resmi Ditahan

Ancaman Hukuman 15 Tahun Penjara

POLRES Berau resmi menetapkan Asrinsyah (25) sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan seksual terhadap korban anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Tabalar. Kasus ini berhasil diungkap setelah polisi menerima laporan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Kasus ini terungkap berkat inisiatif orang tua korban yang curiga dan mencari tahu kebenaran isu penyimpangan seksual di kalangan anak sekolah di Tabalar.

Kanit PPA Polres Berau, Iptu Siswanto, menjelaskan, orang tua korban, berinisial SH, memanggil dua anak sekolah berinisial SSR dan R. Setelah ditanya, kedua anak tersebut menceritakan semua kronologis yang dialami.

"Awal mulanya tentang penyimpangan seksual, suka sesama jenis. Setelah ditanya ternyata menceritakan semua kronologisnya," ujar Siswanto, Jumat (5/12/2025).

Orang tua korban, ditemani korban dan guru, kemudian melapor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPKBP3A) Berau untuk pendampingan psikologi, sebelum akhirnya membuat laporan resmi ke Polres Berau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diidentifikasi sebagai Asrinsyah. Pelaku berhasil diamankan pihak Polres Berau pada Selasa (11/11/2025), sesaat setelah ia kembali ke Berau dari Yogyakarta.

Modus Beasiswa dan Ancaman Hukuman

Siswanto mengungkap-



kan, Asrinsyah melakukan aksi pencabulan, yang telah berlangsung sejak 2021 di Tabalar, dengan modus mengim-ingi korban.

"Modusnya dikasih iming-iming nanti tak kasih beasiswa, kita tebuskan beasiswa, tak permudah, ada juga yang diiming-imingi diberikan sesuatu," jelas Siswanto.

Hingga konferensi pers pada Jumat (5/12/2025), jumlah korban yang sudah melapor dan teridentifikasi berjumlah empat orang, dengan usia korban antara 15-17 tahun. Polisi menduga jumlah korban sebenarnya lebih banyak, namun sebagian besar enggan melapor karena alasan malu, termasuk beberapa korban yang berstatus mahasiswa.

Atas perbuatannya, Asrinsyah dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 82 ayat 1 Perpu 1 Tahun 2016 serta Pasal 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014. Asrin-

syah kini terancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp5 miliar.

Korban Mendapat Pendampingan Intensif

Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Berau, Yusran, memastikan, para korban berada dalam kondisi aman dan akan mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis.

"Kami lakukan monitoring dan evaluasi dengan keadaannya selanjutnya, untuk sementara masih bisa dikatakan aman," kata Yusran.

Pendampingan ini bertujuan untuk memulihkan trauma yang dialami korban dan akan dilakukan secara intensif hingga korban benar-benar pulih.

Yusran juga menjelaskan alasan UPT PPA Berau "irit bicara" terkait kasus ini, yaitu untuk menjaga mental korban



agar tidak semakin tertekan dan malu karena pemberitaan yang berlebihan.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Berau melalui Kepala Seksi Intelijen, Imam Ramdhoni, telah mengonfirmasi penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 19 November 2025. Kejari Berau juga telah menetapkan dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menangani perkara ini.

Dhoni menekankan, proses penyidikan harus dilakukan selengkap mungkin karena kasus ini menarik perhatian publik dan melibatkan korban anak-anak.

Pada konferensi pers di Polres Berau, Asrinsyah dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tersangka hanya tertunduk lesu dan terdiam, tidak menjawab pertanyaan dari wartawan yang meliput. **(ADRIKNI SHOLIKHATI/HENDRA IRAWAN)**



Mengenal Komunitas Tenis Berau: Berbeda Klub Disatukan Event

KOMUNITAS Tenis Berau pertama kali didirikan karena kecintaan terhadap tenis, berkumpul, dan akhirnya membuat event bersama.

Berau memiliki total 36 klub tenis lapangan yang terdaftar dan memiliki jadwal latihan di Lapangan Cendana, Tanjung Redeb, Berau.

Dari puluhan klub tenis lapangan itu, akhirnya terbentuk Komunitas Tenis Berau.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota Komunitas Tenis Berau, Sariadi Hamda, kepada Berauterkini, Rabu (26/11/2025).

“Kalau komunitas ini berdiri secara resmi gitu belum kita buat ya, tapi komunitas ini tuh kumpulan dari klub-klub tenis yang ada 36 ini kita gabungkan,” ungkap Sariadi Hamda.

Jumlah anggota pada Komunitas ini bermacam-macam. Untuk klub Medical Tennis, jumlah anggotanya sekitar 70-an orang.

Menurut Sariadi Hamda, hanya ada



satu syarat untuk bergabung bersama Komunitas Tenis Berau, yakni ikut latihan.

Ketika sudah mulai bisa bermain, maka dipersilakan untuk bergabung menjadi member klub.

“Komunitas tenis itu kami tidak mendeklarasikan bahwa siapa ketua dan sebagainya. Jadi ya kita sama-sama

memiliki komunitas tersebut. Jadi kayak welcome aja gitu,” jelasnya.

Dia mengungkapkan suka duka saat bermain tenis di Berau. Seperti keterbatasan fasilitas, mulai dari jumlah lapangan hingga penerangan.

“Jadi kadang kita nunggu nanti pas hujan ya kita gak bisa main,” keluhnya.

Untuk menjaga keharmonisan antar sesama anggota, Komunitas Tenis Berau mengadakan banyak event. Salah satunya adalah Berau Tennis Fest.

“Kalau itu sih by event-nya. Jadi semakin banyak event yang dibikin maka semakin solid ini orang tenis,” jelasnya.

Lebih jauh, Komunitas Tenis Berau berharap kompetisi tenis di Berau diperbanyak demi menambah atlet tenis asal Berau.

Karena itu, Komunitas Tenis Berau kini berharap dukungan Pemkab Berau dan Pelti Berau dalam pelaksanaan turnamen tenis.

“Kami lagi coba mau mengajukan anggaran, misalnya tahun depan itu harusnya pemerintah juga support, bahwa ada satu event yang kita bisa ngundangin tetangga lah, kayak kemarin, Tarakan, Nunukan, Bulungan, udah semua bikin event,” harapnya.

(ANDRIKNI SHOLIKHATI)



Inflasi November Capai 2,76 Persen Dipicu Kenaikan Harga Ikan

BPS Berau melaporkan bahwa inflasi year on year di Berau pada bulan November 2025 sebesar 2,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 110,04.

Angka tersebut naik setelah sebelumnya inflasi bulan Oktober mencapai 1,78 persen.

Komoditas penyumbang inflasi (YoY) kabupaten berau November 2025 terbesar didominasi oleh ikan layang atau ikan benggol dengan andil inflasi sebesar 0,64 persen.

"Masih tingginya curah hujan yang terjadi sejak Oktober 2025, memberikan dampak yang masih sama pada aktivitas penangkapan ikan laut, utamanya ikan layang," ungkap Kepala BPS Berau, Yudi Wahyudin, dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Komoditas lain penyumbang inflasi (YoY) di Berau

adalah emas perhiasan sebesar 0,68 persen, udang basah 0,18 persen, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu 0,17 persen.

Ikan bandeng atau ikan bolu 0,13 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) 0,13 persen, beras 0,13 persen, ikan kembung atau ikan gembung 0,12 persen, nasi dengan lauk 0,10 persen, dan minyak goreng 0,10 persen.

Sementara itu, pedagang ikan di Tanjung Redeb, Berau mengungkap penyebab naik turunnya harga ikan.

Salah satu pedagang ikan, Bahar mengatakan, naik turunnya harga ikan dipengaruhi oleh cuaca dan musim terang bulan.

"Untuk harga ikan lain naik turun. Apalagi ini kan terang bulan otomatis, ikan laut nda ada," kata Bahar ditemui di Jalan Gunung Martim, Selasa (2/12/2025).

"Jarang, ada tapi nda ter-



lalu banyak. Soalnya pencari ikan naik semua, kecuali orang mancing-mancing," sambungnya.

Bahar menjelaskan, saat ini lapaknya menjual ikan layang dengan harga Rp 50 ribu. "Ini kalau kita ambil di pasar Rp 45 ribu saya jual Rp 50 ribu," ungkapnya.

Harga ikan di lapaknya juga beragam, mulai dari ikan nila seharga Rp 45 ribu, ikan bandeng Rp 35 ribu, ikan mujair Rp 30 ribu.

Pedagang ikan lainnya, Edi mengatakan, harga ikan masih tetap seperti bulan se-

belumnya.

"Ini pengaruh terang bulan lagi. Kalau dulu kan bulan janda itu artinya gelombang kuat. Orang nelayan agak-agak takut ke laut. Makanya kemarin harga ikan lagi naik-naiknya," kata Edi.

Dia mengatakan, harga ikan bisa saja turun harga tergantung dengan kondisi ikan saat tiba di lapaknya.

"Nah, paling turun Rp 3 ribu, Rp 5 Ribu, kalau dia segar datangnya ke sini tuh sampai Rp 60 ribu, Rp 65 ribu itu harganya ikan layang," jelasnya. (ANDRIKNI SHOLIKHATI)



YUDI WAHYUDIN





Berau Amankan Puluhan Tiket Porprov 2026

KONTINGEN olahraga Kabupaten Berau berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.

Sejumlah cabang olahraga sukses meloloskan atlet dan meraih medali, menunjukkan kesiapan Bumi Batiwwakal menuju Porprov di Kabupaten Paser.

Secara keseluruhan, kontingen Berau sukses membawa pulang total puluhan medali dari BK Porprov 2026 yang digelar di berbagai kota selama November hingga Desember 2025.

Cabor Arung Jeram (FAJI) berhasil menorehkan prestasi impresif di Sungai Karang Mumus, Samarinda. Dengan 14 atlet, Berau meraih total 8 medali, yakni 2 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Pengurus FAJI Berau, Suhardi Sidik, menyatakan rasa bangganya, meskipun tantangan terbesar adalah medan

Sungai Karang Mumus yang berbeda dari tempat latihan.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian ini. Dua emas yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh atlet," ujar Suhardi.

Ia menegaskan, perolehan medali ini menjadi modal berharga dan akan disusul evaluasi intensif untuk memaksimalkan performa di Porprov.

Sementara itu, Cabor Biliar (POBSI) juga tampil gemilang di Balikpapan dengan total 8 medali, terdiri dari 2 emas, 1 perak, dan 5 perunggu.

Ketua POBSI Berau, Saidin Saputra, mengapresiasi kerja keras atlet dan optimis Berau bisa masuk persaingan medali utama di Paser.

Dua Cabor lainnya mencatat kelolosan yang sempurna di semua nomor tanding yang diikuti:

Dansa (IODI) berhasil meloloskan seluruh atlet di semua kelas tanding yang diikuti pada BK di Samarinda. Tim dansa Berau juga sukses membawa pulang 7 medali,



yang terdiri dari satu emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Ketua IODI Berau, Meliana, menyoroti usia atlet yang masih sangat muda, menjadi modal besar untuk optimisme tinggi di Porprov.

Woodball juga dipastikan tampil di Porprov setelah berhasil meloloskan sembilan nomor tanding dari sepuluh atlet yang dikirim pada BK di Palaran, Samarinda.

Pelatih Ardiyan Johir menyatakan semua nomor yang diikuti lolos, meskipun mereka menghadapi pembatasan jumlah atlet dari Dispora.

Cabor Triathlon (FTI) juga mengamankan tiket ke Porprov setelah sukses meraih total 5 medali, yang terdiri dari

3 emas di kategori elite, serta 1 emas dan 1 perak di kategori youth di Tenggarong.

Ketua FTI Berau, Yudhi Rizal, mengaku bangga namun menegaskan masih banyak pembenahan teknis yang harus dilakukan, terutama untuk mengatasi penalti dan memperkuat pembinaan atlet muda.

"Target kami bukan hanya tampil, tapi mampu membawa pulang medali di Porprov 2026," tegas Yudhi.

Semua pengurus Cabor menegaskan akan segera memasuki fase evaluasi dan latihan intensif untuk memastikan capaian medali di Porprov 2026 Paser jauh lebih besar dan membanggakan Kabupaten Berau. **(HENDRA IRAWAN)**

RIBUAN TURIS SAMBANGI DESTINASI WISATA SEJARAH BERAU

SEKTOR wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Berau mencatat tren positif sepanjang tahun 2025.

Dua destinasi unggulan, yakni Museum Batiwakkal dan Keraton Sambaliung, menunjukkan tingginya minat kunjungan turis, baik wisatawan domestik maupun turis asing.

Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir, mengatakan bahwa Museum Batiwakkal tetap menjadi salah satu tujuan wisata budaya paling diminati.

Di mana, hingga tahun berjalan 2025, museum yang menyimpan jejak sejarah Kesultanan Gunung Tabur itu mencatat 2.648 wisatawan domestik dan 10 wisatawan asing.

"Museum Batiwakkal se-



lalu menjadi pilihan wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan budaya Berau. Antusiasme pengunjung masih stabil dan menunjukkan bahwa museum tetap relevan sebagai destinasi edukatif," ujar Ilyas Natsir.

Sementara itu, Keraton Sambaliung yang berada di tepi

Sungai Kelay juga menunjukkan angka kunjungan yang tinggi, dengan 2.641 wisatawan domestik dan 21 wisatawan asing.

Menurutnya, keberadaan bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Sambaliung ini terus menarik perhatian wisatawan karena nilai budaya

dan arsitekturnya.

Dia menjelaskan, tarif retribusi kedua destinasi tersebut tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Rp10.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak.

Pendapatan dari retribusi ini digunakan untuk mendukung pemeliharaan kawasan, peningkatan fasilitas, serta penguatan program edukasi sejarah.

"Kami terus mendorong agar museum dan keraton tidak hanya menjadi tempat wisata, tetapi juga pusat pembelajaran budaya. Retribusi yang masuk akan kembali untuk perawatan dan peningkatan kualitas layanan bagi pengunjung," terangnya. **(DINI DIVA APRILIA)**



Berau Terkini
tak berhenti

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, **Digital Marketing Manager** : Aidil Anugrah, **Iklan** : Siti Nur Ariska, **Admin** : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, **Iklan dan informasi** : berauterkini2023@gmail.com
Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, **Telepon** : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, **Editor** : Maulana Ilhami Fawdi, **Reporter** : Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Adrikni Sholikhahati, **Grafis** : Surya Adji Permana, **Media Sosial** : Siti Nur Ariska, **IT & Web Development** : Fathurrohman.